

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Adjie, Habib, 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Inonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah , Andi, 1989, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, 2006, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Lubis, Suhrawardi K, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan IV, Sinar Grafika, Jakarta,
- Muhammad, Abdulkadir, 1997, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta.
- Notodisoerjo, Soegondo.R, 1993, *Hukum Notariat Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sjaifurrachman, Adjie, Habib, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sumardjono, Maria. S.W 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta,

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, cetakan kedua, Balai Pustaka, Jakarta,

Tobing, Lumban. G.H.S, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Wiranata, I Gede A.B, 2005, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, PT. Aditya Citra Bakti, Bandung

## **B. Hasil Penelitian**

Gautama, Primanda Furry, “Implementasi Sanksi Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

Nurhera, “Pengawasan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pemakaian Media Cetak Untuk Promosi Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman”. *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

Sakti, Selqy Intan Mayang, “Peranan Dewan Kehormatan Daerah Terhadap Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Tulungagung”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

## **C. Internet**

Luas Daerah dan Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru, [http ://www. dukcapil.kemendagri.go.id/laporan](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/laporan), diakses pada 20 Maret 2015.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Staatsblad* Tahun 1848 Nomor 10

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M. 01. HT. 03. 01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M. 02. PR.08. 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M. 01.HT. 03. 01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M. HH. 05. AH. 02. 11 Tahun 2009 tentang Formasi Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005.

Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres XIX Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta 27-28 Februari 2006.

Anggaran Dasar Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diperluas (Pra kongres), Pekanbaru 7 Desember 2012